

KINERJA KEUANGAN DAERAH, KORUPSI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI AGENSI

Afrimayosi

E-mail: oshimira@gmail.com

ABSTRACT

Public welfare is the ultimate goal of the state development. The implementation of fiscal decentralization is one of the instruments to realize public welfare in the regions by bringing public services closer to the community. The relationship between local government and society in the perspective of agency theory is interesting to study. Local governments in carrying out their authority and responsibilities are expected to achieve good financial performance and then are expected to be able to improve the public welfare. However, on the one hand, the authority possessed by local governments can lead to opportunistic behavior in the form of acts of corruption that can hinder the achievement of people's welfare. This study aims to determine the long-term effects of local financial performance and the level of corruption on public welfare as measured by the human development index. The study was conducted in all provinces in Indonesia. The data used are regional financial performance and the level of corruption in 2011-2016 to predict the 2013-2018 human development index. Hypothesis testing is done by using the Structural Equation Model of WarpPLS. There were 186 samples collected using the purposive sampling method. The results showed that local financial performance had a positive effect on public welfare and the level of corruption had a negative effect on public welfare.

Keywords: agency theory, local financial performance, corruption, public welfare

JEL Classification: D73, H76, I31

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia telah memasuki era desentralisasi dimulai sejak terbitnya UU 22/1999 yang diubah menjadi UU 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah diserahkan oleh pemerintah pusat segala tugas dan wewenang yang berhubungan dengan urusan pemerintahan daerah dan juga kepentingan masyarakat secara mandiri. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badrudin & Siregar, 2015).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat digambarkan oleh IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM Indonesia mulai dihitung sejak tahun 1996 secara berkala 3 (tiga) tahun sekali. Kemudian mulai dihitung setiap tahun sejak 2004 untuk kepentingan Kementerian Keuangan dalam menghitung DAU (Dana Alokasi Umum) (www.bps.go.id). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan IPM Indonesia sebesar 71,39. IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 80,47 sedangkan yang terendah adalah Papua sebesar 60,06. Perbedaan antara provinsi IPM

tertinggi dengan yang terendah adalah sebesar 20,41. Hal ini menunjukkan masih cukup tinggi kesenjangan antar provinsi di Indonesia yang menjadi tantangan pembangunan manusia kedepan.

Analisis kinerja atas keuangan daerah bisa dilakukan dengan *analytical procedure* melalui rasio kinerja. Pengelolaan yang dinilai baik, akan memberikan efek baik juga bagi ketersediaan layanan untuk publik. Pengelolaan keuangan daerah masih memiliki beberapa permasalahan. Kementerian Keuangan menilai pemanfaatan APBD masih mengalami ketimpangan antara porsi belanja pegawai dan belanja modal. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tiga tahun terakhir (2016-2018) menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah mengalokasikan belanja pembangunan (belanja langsung) lebih kecil daripada belanja rutin (belanja tidak langsung). Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) II/2018 yang dipublikasikan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) mengungkapkan 2.913 temuan yang memuat 3.867 permasalahan senilai Rp1,05 triliun.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis hubungan kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Hamid (2018) di kabupaten Majalengka Jawa Barat; Putry & Badrudin (2017) di kabupaten/kota DI Yogyakarta; Amalia & Purbadharmaja (2014) di Bali (kabupaten/kota) dan Suryaningsih, Utama & Yasa (2015) di Bali (kabupaten/kota) mendapatkan hasil kinerja keuangan daerah positif pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu penelitian Indramawan (2018) di Papua dan Papua Barat (kabupaten/kota); Harliyani & Haryadi (2016) di Jambi; Azwar & Subekan (2014) di Sulawesi Selatan dan Anggraini & Sutaryo (2015) di seluruh pemerintah provinsi Indonesia, memberikan kesimpulan yang berbeda-beda mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah berfungsi sebagai pengelola keuangan di daerah yang bertanggung jawab sehubungan dengan penggunaan kekayaan daerahnya dapat menciptakan sistem pertanggungjawaban. Akan tetapi di era reformasi saat ini, fenomena korupsi banyak terjadi di Indonesia yang menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan daerah (Heriningsih & Marita, 2013). Pemerintah daerah bersama DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki

informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat mengenai sumber daya daerah dalam bentuk APBD. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi.

Asimetri informasi berpotensi menyebabkan pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyelewengan atau praktik korupsi. Pemerintah daerah dan DPRD sebagai *agent* dapat mengambil keputusan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya sehingga dapat merugikan masyarakat sebagai *principal*. Laporan tahun 2018 ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mengungkapkan jumlah kasus korupsi di berbagai pemerintahan daerah sebanyak 429 kasus atau 94 persen dari jumlah kasus korupsi di Indonesia dengan nilai kerugian negara Rp2,6 triliun.

Transparency International menerbitkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia tahun 2018 berada di skor 38, membaik dibandingkan tahun 2017 yang berada di skor 37. Hal ini menggambarkan adanya *trend* positif upaya penanganan korupsi. Akan tetapi memutus rantai praktik korupsi para oknum pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis tidaklah mudah. Data penanganan perkara korupsi dalam Laporan Tahunan yang dilaporkan oleh Kejaksaan Agung dan data penindakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2018 menggambarkan bahwa kasus korupsi terdapat di semua daerah di Indonesia dengan jumlah kasus yang bervariasi. Dalam 15 tahun terakhir ini kasus korupsi paling banyak terjadi menyangkut perkara penyuaipan dan pengadaan barang/jasa (KPK, 2019). Data bulan Januari sampai dengan Oktober 2019, KPK telah menangkap 7 orang kepala daerah. Selain kepala daerah, kasus korupsi juga melibatkan anggota DPRD. Sepanjang tahun 2018 muncul fenomena korupsi berjamaah yang ditangani KPK di tiga daerah yang terdiri dari puluhan anggota DPRD yaitu: 41 anggota DPRD Malang, 38 anggota DPRD Sumatera Utara dan 53 anggota DPRD Jambi (www.nasional.kompas.com diakses tanggal 21/12/2019).

Hall (2012) mengemukakan adanya relasi antara korupsi dan pelayanan publik. Korupsi telah menggerus pelayanan publik dan menghabiskan anggaran negara karena beralihnya ke tangan para elit politik yang korup. Pemberian kekuasaan dan wewenang kepada daerah pada pelaksanaan otonomi daerah bisa mengakibatkan masalah baru bagi pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi dapat berkontribusi dalam

menyebabkan tingginya tingkat korupsi jika peman-tauan birokrat tidak berjalan (Lessmann & Markwardt, 2009).

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti hubungan antara korupsi dan variabel yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Penelitian Junaidi & Pa-tra (2018) menemukan bahwa korupsi secara langsung dapat mempengaruhi dan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran program sosial dan kesejahteraan pemerintah. Penelitian di 54 negara berkembang menghasilkan simpulan korupsi negatif dan signifikan pengaruhnya pada pembangunan manusia (Subandoro & Amir, 2017). Sejalan dengan itu, Hanafi (2018) me-nyatakan bahwa korupsi memberikan dampak buruk terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Korupsi berdampak pada sejumlah proyek pembangunan, tim-bulnya fasilitas umum mutu rendah dan tidak sesuai kebutuhan, sehingga hal ini dapat menghambat proses pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang (Santoso, 2011).

Para peneliti sebelumnya menguji kinerja keuangan daerah dan tingkat korupsi pada kesejahteraan masyarakat menggunakan data di tahun yang sama untuk semua variabel. Perbedaan ditemukan pada penelitian Anggraini & Sutaryo (2015) yang menguji pengaruh kinerja keuangan daerah tahun tertentu dengan IPM tahun berikutnya. Hal ini kurang sejalan dengan konsep IPM yang bersifat jangka panjang. IPM tidak responsif terhadap perubahan kebijakan jangka pendek, sehingga tidak dapat menilai dalam jangka pendek perkembangan pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena komponen AMH (Angka Melek Huruf) dan AHH (Angka Harapan Hidup) (Badrudin, 2017).

Kinerja keuangan daerah dan tingkat korupsi di tahun tertentu menjadi kurang tepat diuji secara lang-sung pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di tahun tersebut. Pengujian pada penelitian sebelu-mnya menjadi kurang logis dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan *outcome* pembangunan yang diukur dalam jangka panjang dan melalui proses pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mendo-rong penulis untuk melakukan penelitian efek jangka panjang kinerja keuangan daerah dan tingkat korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi Indonesia.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Agensi

Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) dan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama *principal* merupakan hubungan keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Pendelegasian wewenang dari *principal* ke *agent*, terkadang akan menimbulkan masalah karena terdapat perbedaan kepentingan di antara *agent* dan *principal* di dalam organisasi. Teori agensi menyatakan bahwa pendelegasian wewenang pengambilan keputusan ini memungkinkan *agent* un-tuk terlibat dalam perilaku mementingkan diri sendiri daripada kepentingan *principal* (Balago, 2014).

Sejak otonomi daerah di Indonesia berlaku berdasarkan UU 22/1999, perspektif keagenan (*agency theory*) dapat diterapkan pada sektor publik (Halim & Abdullah, 2006). Pemerintah daerah dan DPRD dalam UU 23/2014 merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah (pemda) yang berkedudukan sebagai mitra serta dibantu perangkat daerah. DPRD menjalankan fungsi anggaran bersama-sama untuk menetapkan APBD dengan pemerintah daerah. Se-hingga dalam konteks ini, keduanya bertindak sebagai *agent* dan di sisi lain masyarakat sebagai *principal*. Teori agensi memiliki fokus atas permasalahan asimetri informasi, yaitu *agent* memiliki lebih banyak infor-masi mengenai kinerja, motivasi, dan tujuan yang sebenarnya yang kemudian berpotensi menimbulkan terjadinya *moral hazard* (Badrudin, 2017). Asimetri informasi terdiri dari: 1) *adverse selection* yang meru-pakan keadaan *agent* memiliki informasi lebih banyak dan kemungkinan kepada *principal* fakta-fakta tersebut tidak disampaikan, dan 2) *moral hazard* merupakan tindakan yang tidak layak secara etika dan norma yang dilakukan *agent* diluar pengetahuan *principal* (Scott, 2000).

Asimetri informasi antara pemda dengan ma-syarakat menyebabkan terbuka ruang untuk terjadinya perilaku oportunistik didalam proses penyusunan ang-garan. Kemungkinan perilaku ini lebih besar diband-ingkan di dunia bisnis yang memiliki *automatic checks* berupa persaingan (Badrudin, 2017). Mardiasmo (2002) menerangkan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan, menyampaikan laporan

dan memberi informasi segala aktivitas yang merupakan tanggungjawabnya pada masyarakat merupakan bentuk akuntabilitas di sektor publik. Penyampaian laporan keuangan oleh *agent* kepada *principal* dapat mengurangi asimetri informasi.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal (DF) dalam UU 33/2004 merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengurus segala urusan pemerintahan dalam kerangka sistem NKRI. Prinsip “*money should follow function*” penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ada konsekuensi anggaran pelaksanaan atas setiap penyerahan dan pelimpahan wewenang pusat ke daerah. Kreativitas, kemampuan organisasi pemda dan kondisi daerah sangat mempengaruhi keberhasilan daerah dalam upaya melaksanakan kewenangannya. (Badrudin, 2017). Rochjadi (2006) mengungkapkan bahwa dalam mengelola pembangunan, mendorong perekonomian daerah dan nasional, desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumennya.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat (KM) ditunjukkan dari pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih baik berupa 1) distribusi kebutuhan dasar yang merata, 2) peningkatan kehidupan, pendapatan, pendidikan, dan perhatian terhadap budaya kemanusiaan, dan 3) ketersediaan pilihan sosial akibat adanya perluasan skala ekonomi (Todaro & Stephen, 2006). Pada tahun 1970-an standar kehidupan masyarakat diukur menggunakan indikator GDP per kapita atau PDB per kapita, akan tetapi banyak mendapatkan kritikan karena cara pandang yang terlalu sederhana (Badrudin, 2017). Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan konsep IPM yang telah memadukan pendekatan kuantitas dan juga kualitas hidup (Todaro & Stephen, 2006).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia harus menjadi fokus pembangunan, karena kekayaan bangsa yang sesungguhnya adalah manusia. Konsep ini menjadi penyebab munculnya IPM pada tahun 1990 oleh UNDP yang menyatakan pembangunan manusia merupakan proses dalam rangka memperbanyak tersedianya pilihan-pilihan bagi manusia. Umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang

layak merupakan tiga dimensi dasar IPM (BPS, 2014).

Kinerja Keuangan Daerah (KKD)

Pemda dalam DF dituntut untuk bisa meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerahnya. Evaluasi atas KKD perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Mardiasmo, 2005). Evaluasi atas KKD diantaranya dapat melalui penghitungan rasio-rasio kinerja berdasarkan data APBD dan LRA. Analisis rasio KKD terdiri dari rasio derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian, efektivitas dan efisiensi PAD, efektivitas pajak daerah, efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) (Mahmudi, 2019). Mardiasmo (2009) menyatakan pada sektor publik, kinerja dapat dinilai dari pencapaian pada anggaran dan analisis perbedaan atau selisih kinerja aktual dan yang dianggarkan.

Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF)

RDF menunjukkan kemampuan pemda menyelenggarakan desentralisasi. RDF diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2019). Mursinto dalam Badrudin (2017) menyatakan penghitungan RDF dengan rasio PAD dengan total pendapatan daerah mengandung kelemahan karena mengukur kemandirian daerah hanya tergantung dari nilai total pendapatan daerah dan tidak memperhatikan pendistribusian dari total pengeluaran daerah. Rasio yang dirumuskan dalam mengukur desentralisasi fiskal adalah membandingkan PAD pada pengeluaran daerah (Badrudin, 2017).

Rasio Efektivitas PAD (REPAD)

REPAD menunjukkan kemampuan pemda dalam mengelola penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan. Mahmudi (2019) dan Halim (2007) menyatakan REPAD dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD.

Rasio Penyerapan Anggaran Belanja (RPAB)

RPAB menunjukkan kemampuan pemda dalam melaksanakan dan juga mempertanggungjawabkan kegiatan yang direncanakan (Ramdhani & Anisa, 2017). Halim (2014) menyatakan penyerapan anggaran adalah pencapaian dari estimasi/perkiraan yang akan dicapai dalam suatu periode waktu (realisasi dari anggaran).

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator penting atas kinerja birokrasi, karena penyerapan anggaran ini berperan terhadap pertumbuhan ekonomi (Sinaga, 2016). Perbandingan pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilakukan untuk menganalisis penyerapan anggaran belanja (Yunita & Putra, 2018), sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Rasio Keserasian Belanja (RKB)

RKB menunjukkan aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerah dan bagaimana pemda mengalokasikan dana secara optimal pada belanja aparatur dan pelayanan publik (Mahsun, 2013). RKB berguna untuk menganalisis keseimbangan antarbelanja. Analisis RKB dapat berupa: analisis belanja per fungsi, belanja operasi, belanja modal serta belanja langsung dan tidak langsung (Mahmudi, 2019). Untuk peningkatan kualitas layanan publik (pembangunan prasarana dan sarana publik) didanai dari belanja pembangunan (Badrudin, 2017).

Tingkat Korupsi (TK)

Korupsi berasal dari kata *corruption* (bahasa latin) yang memiliki kata kerja *corrumpere* yang memiliki makna rusak, busuk, memutar balik, menggoyahkan atau menyogok. Huntington (1968) menyatakan bahwa korupsi berupa perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum (Liu & Lin, 2012).

Berbagai praktik korupsi yang dilakukan menurut Amundsen (1999) dapat dikategorikan yaitu: 1) suap (*bribery*), 2) penggelapan (*embezzlement*), 3) penipuan (*fraud*), 4) pemerasan (*extortion*), 5) favoritisme, dan 6) nepotisme. Mauro (1998) menemukan bahwa korupsi mengurangi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Korupsi mempengaruhi pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui dua cara yaitu: 1) korupsi dapat menambah biaya pelayanan, dan 2) korupsi dapat menurunkan kualitas layanan (Gupta, Davoodi, & Tiongson, 2000).

Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan desentralisasi fiskal adalah lebih bisa mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama bertanggungjawab dalam penyusunan dan penetapan anggaran pemda yang menjadi acuan kinerja. Berdasarkan teori agensi, masyarakat dan pemda terikat kontrak yang mewajibkan pemda memenuhi kepentingan masyarakat. Masalah asimetri informasi timbul dalam hubungan antara pemda sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap hasil kerja pemerintahan daerah apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang ada. Evaluasi atas kinerja keuangan melalui analisis rasio akan menggambarkan bagaimana pemda mengelola keuangan daerahnya. Semakin baik penilaian kinerja keuangan suatu daerah menandakan baiknya kinerja pemda (*agent*) yang diharapkan semakin baik pula layanan publik kepada masyarakat (*principal*), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2018), Putry & Badrudin (2017), Amalia & Purbadharmaja (2014) dan Suryaningsih Utama & Yasa (2015) telah membuktikan KKD berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu Indramawan (2018), Harliyani & Haryadi (2016), Azwar & Subekan (2014) dan Anggraini & Sutaryo (2015) menunjukkan hasil yang berbeda tentang pengaruh kinerja keuangan daerah pada kesejahteraan masyarakat. Inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk menguji kembali pengaruh KKD pada kesejahteraan masyarakat dengan hipotesis berikut ini:

H1: Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

Tingkat Korupsi dan Kesejahteraan Masyarakat

Fenomena korupsi yang banyak terjadi di hampir semua institusi pemerintahan termasuk pemerintahan daerah dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama bertanggungjawab dalam penyusunan dan penetapan anggaran pemerintahan daerah.

Berdasarkan teori agensi, masalah asimetri informasi timbul karena pemerintah daerah dan DPRD memiliki informasi mengenai sumberdaya keuangan yang lebih banyak dibandingkan masyarakat. Selain itu, terkadang kepentingan pemerintah daerah dan DPRD (*agent*) tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat (*principal*). Dalam rangka mewujudkan kepentingan individu atau kelompoknya, terkadang *agent* mengorbankan kepentingan *principal* yang menciptakan terjadinya konflik kepentingan.

Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi menyebabkan pemerintah daerah dan DPRD dapat melakukan *moral hazard* berupa penyelewengan atau tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai *agent*. Dalam pengelolaan keuangan daerah tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, oknum pemerintah daerah dan DPRD dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya dan merugikan kepentingan masyarakat sebagai *principal*.

Tindakan korupsi oleh oknum pemda sebagai *agent* dalam pengelolaan keuangan daerah akan berdampak kepada pelayanan publik di daerah. Korupsi menyebabkan bertambahnya biaya pelayanan publik dan juga menurunnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik terutama kesehatan dan pendidikan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga penurunan kualitas pelayanan publik akan memiliki pengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai *principal*. Tindak korupsi yang dilakukan *agent* merupakan cerminan perilaku *agent* yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dan mengorbankan kepentingan *principal*. Sehingga semakin tingginya tingkat korupsi maka akan semakin buruk dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junaidi & Patra (2018), Subandoro & Amir (2017), dan Hanafi (2018) menunjukkan hasil bahwa korupsi memberi dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung juga oleh Akcay (2006) yang melakukan penelitian pada 63 negara di dunia yang menemukan tingkat korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Studinya secara empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki IPM lebih rendah. Berdasarkan penjelasan ini penulis ingin melakukan konfirmasi pengaruh tingkat

korupsi pada kesejahteraan masyarakat melalui hipotesis:

H2: Tingkat korupsi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat

Populasi penelitian ini seluruh provinsi Indonesia sebanyak 34 provinsi. Teknik *purposive sampling* dalam penelitian dengan mengambil sampel berdasar kriteria: 1) provinsi yang memiliki Kejaksaan Tinggi, 2) provinsi yang memiliki ketersediaan data yang dapat diakses untuk seluruh variabel untuk periode tahun 2011-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jangka panjang variabel independen pada variabel dependen dengan menggunakan variabel kontrol. Sampel data yang digunakan adalah kinerja keuangan daerah, tingkat korupsi dan PDRB per kapita tahun 2011-2016 dan data kesejahteraan masyarakat tahun 2013-2018. Penelitian ini menambahkan analisis *trend* untuk melihat perkembangan kinerja keuangan suatu daerah, perkembangan tingkat korupsi dan pertumbuhan IPM masing-masing wilayah provinsi Indonesia dengan pengamatan data tahun 2011-2018.

Sumber data adalah: 1) data IPM dan PDRB per kapita didapat dari situs www.bps.go.id, 2) data APBD dan LRA provinsi yang didapat dari situs www.djpk.kemkeu.go.id, dan 3) data tingkat korupsi berasal dari Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI yang diakses dari situs www.kejaksaan.go.id dan permintaan dokumen langsung kepada bagian meja informasi Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Agung RI, dan juga laporan rekapitulasi penindakan kasus korupsi oleh KPK yang dapat diakses melalui situs www.kpk.go.id.

Penelitian memiliki satu variabel dependen (endogen), dua variabel independen (eksogen), dan satu variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah dan tingkat korupsi. Variabel dependen adalah kesejahteraan masyarakat. Variabel kontrol menggunakan PDRB per kapita. Terdiri dari empat indikator yaitu RDF, REPAD, RPAB dan RKB langsung. Rasio Desentralisasi Fiskal yang menunjukkan kemampuan pemda dalam meyelenggarakan desentralisasi. Kemampuan ini ditunjukkan dari besar kecilnya PAD dan DBH Pajak/Non Pajak dibandingkan pada total pengeluaran daerah (Badrudin, 2017).

$$\frac{(\text{PAD} + \text{DBH Pajak/Non Pajak})}{(\text{Total Pengeluaran Daerah})} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD yang menunjukkan kemampuan pemda merealisasikan PAD. Realisasi PAD kemudian dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan (Halim, 2007).

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Penyerapan Anggaran Belanja yang menunjukkan kemampuan pemda dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan (Adopsi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 dan Yunita & Putra, 2018).

$$\frac{(\text{Realisasi Belanja})}{(\text{Anggaran Belanja})} \times 100\%$$

Rasio Keserasian Belanja langsung yang menggambarkan kemampuan pemda mengalokasikan belanja langsung (belanja publik/belanja pembangunan) (Mahmudi, 2019).

$$\frac{(\text{Total Belanja Langsung})}{(\text{Total Belanja Daerah})} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini tingkat diukur berdasarkan jumlah kasus korupsi (JKK). Tingkat korupsi cerminan dari kasus korupsi yang terjadi pada setiap provinsi yang disesuaikan dengan ukuran populasi (kasus per 10.000 penduduk) (Liu & Lin, 2012). Jumlah kasus korupsi yang digunakan adalah jumlah kasus korupsi pada tahap penuntutan di kejaksaan dan jumlah kasus korupsi yang ditindak di KPK. Pemilihan penggunaan pengukuran ini karena data merupakan kasus korupsi di Indonesia yang riil terjadi, bukan hanya berupa persepsi dan opini masyarakat tentang korupsi (Indeks Persepsi Korupsi). Tingkat korupsi diformulasikan sebagai berikut (Liu & Lin, 2012):

$$\text{Tingkat Korupsi} = \frac{(\text{Total kasus korupsi pemerintah daerah})}{(\text{Total jumlah penduduk daerah}/10.000)} \times 100\%$$

Kesejahteraan masyarakat diukur dari nilai IPM. IPM digunakan untuk mengetahui tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah atau daerah yang diukur dari dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2014). Nilai IPM dapat

dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir (jumlah nilai tambah) yang dihasilkan oleh unit ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB per kapita yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dengan harga konstan.

HASIL PENELITIAN

Analisis *Trend*

Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa seluruh provinsi di Indonesia memiliki *trend* kenaikan nilai IPM. Provinsi yang memiliki *trend* kenaikan IPM tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 0,7280 dan yang memiliki *trend* kenaikan IPM terendah adalah IPM rata-rata Kalimantan Timur-Kalimantan Utara sebesar 0,1386. Nilai *trend* kenaikan PDRB per kapita DKI Jakarta tertinggi yaitu 6.805,04 dan yang memiliki *trend* kenaikan terendah adalah Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 103,54. *Trend* penurunan PDRB per kapita adalah rata-rata Kalimantan Timur-Kalimantan Utara sebesar -2.857,15 dan Riau sebesar -253,51.

Trend kenaikan JKK terjadi hampir diseluruh provinsi di Indonesia yaitu 26 provinsi. *Trend* kenaikan JKK tertinggi adalah Bengkulu dengan nilai 0,0636. Provinsi yang memiliki *trend* penurunan JKK adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DI Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan dan Maluku.

Trend KKD meliputi *trend* masing-masing rasio indikatornya. *Trend* kenaikan RDF terdapat di 11 provinsi dengan *trend* kenaikan terbesar yaitu Jawa Timur dengan nilai 0,0053. RDF di 23 provinsi lainnya mengalami *trend* penurunan dengan *trend* penurunan terbesar adalah rata-rata RDF Kalimantan Timur-Kalimantan Utara sebesar -0,0731. *Trend* kenaikan REPAD hanya terjadi di 6 provinsi yaitu Jawa Timur, NTT, Sulsel-Sulbar, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. *Trend* kenaikan REPAD terbesar adalah Sulawesi Tenggara sebesar 0,0288. REPAD di 28 provinsi mengalami *trend* penurunan dengan *trend* penurunan terbesar adalah Riau sebesar -0,0841.

Trend kenaikan RPAB terjadi hanya di 3 provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (0,0009), Maluku (0,0016) dan Nusa Tenggara Barat (0,0028). RPAB di 31 provinsi mengalami *trend* penurunan dengan *trend* penurunan terbesar adalah Banten sebesar -0,0208. *Trend* kenaikan RKB langsung terdapat di 21 provinsi dengan yang terbesar adalah DI Yogyakarta sebesar 0,0254. Terdapat 13 provinsi yang mengalami *trend* penurunan RKB langsung. *Trend* penurunan terbesar adalah DKI Jakarta sebesar -0,0222.

Penghitungan Nilai Goodness of Fit (Inner Model)

Berdasar hasil analisis SEM WarpPLS menunjukkan nilai *R-square* kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 0,357. Artinya variabel kinerja keuangan dan tingkat korupsi hanya mampu menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 35,7%. Sisanya sebesar 64,3% untuk variabel kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Kesesuaian model dengan data dan juga kualitas model yang diteliti dapat dilihat dari *Fit Model*. Penghitungan *Average R-Square* (ARS) dan *Average Path Coefisien* (APC) digunakan untuk melihat keterkaitan antar variabel serta *Average Variance Inflation Factor* (AVIF) menunjukkan korelasi atau multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 1 menunjukkan indikator fit model terpenuhi. APC dan ARS signifikan, nilai $p < 0,001$. Indikator AVIF dibawah batasan 5 yaitu 2,131. Indikator fit model sudah memenuhi kriteria *goodness of fit model* sehingga model dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis.

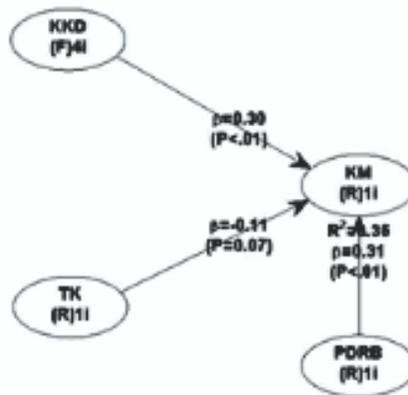
Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen adalah KKD dan TK, sedangkan variabel dependen adalah KM. Gambar 1 menunjukkan hasil pengujian hipotesis.

Tabel 1
Nilai Goodness of Fit Model

Hasil	P-Value	Kriteria	Keterangan
ARS = 0,357	$P < 0,001$	$P \leq 0,05$	Diterima
APC = 0,240	$P < 0,001$	$P \leq 0,05$	Diterima
AVIF = 2,131		AVIF < 5	Diterima

Sumber: output hasil olah data



Sumber: output hasil olah data

Gambar 1
Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	<i>P-value</i>	Prediksi	Temuan	Simpulan
KKD → KM	0,30	<0,01***	+	+	Diterima
TK → KM	-0,11	0,07*	-	-	Diterima

Sumber: output hasil olah data

Keterangan:

*** $p \leq 0,01$; ** $p \leq 0,05$; * $p < 0,1$

PEMBAHASAN

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengujian KKD terhadap KM menunjukkan arah yang positif dan signifikan, ditunjukkan oleh nilai *P-value* <0,01 dan nilai koefisien jalur positif ditunjukkan dengan nilai 0,30. Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan KKD berpengaruh positif terhadap KM diterima. KKD merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah. Pemda dituntut untuk mencapai kinerja yang baik, sehingga melakukan pelayanan yang optimal dapat diberikan kepada masyarakat. Semakin baik KKD menandakan semakin baik kinerja pemda yang dapat mendorong semakin baiknya pelayanan publik dan diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah.

Pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa KKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap KM. Artinya semakin tinggi KKD, semakin tinggi pula KM. Penelitian yang mendukung hasil ini adalah Hamid (2018), Putry & Badrudin (2017), Amalia & Purbadharmaja (2014) dan Suryaningsih Utama & Yasa (2015) yang menunjukkan bahwa KKD berpengaruh positif terhadap KM. Hasil ini juga didukung teori agensi yang menyatakan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* dapat dikurangi, salah satunya adalah dengan adanya pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan termasuk masyarakat, sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat mengawasi hasil kerja yang dilakukan oleh pemda sebagai *agent* dalam mengelola keuangan daerah.

Pengaruh Tingkat Korupsi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengujian TK terhadap kesejahteraan masyarakat KM menunjukkan arah negatif dan signifikan dengan

P-value 0,07 ($p < 0,1$) dan nilai koefisien jalur negatif ditunjukkan dengan nilai -0,11. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan TK berpengaruh negatif terhadap KM diterima. Korupsi merupakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh *agent* yang dalam hal ini adalah pemda. Asimetri informasi dalam hubungan pemda dan masyarakat sebagai *principal* menimbulkan *moral hazard* yang menciptakan praktik-praktik korupsi. Ketidaksielarasan tujuan antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat berpotensi membuat pemerintah daerah dan DPRD mengambil keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya serta mengorbankan kepentingan kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan.

Semakin tinggi tingkat korupsi yang dilakukan pada pemerintahan daerah yang dapat diukur dari jumlah kasus korupsi yang terjadi akan mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan publik dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang terganggu oleh tindakan korupsi terutama menyangkut pelayanan kesehatan dan pendidikan erat kaitannya dengan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Sehingga semakin tinggi tingkat korupsi, maka akan semakin buruk dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan TK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KM. Artinya semakin tinggi TK maka akan semakin menurunkan KM. Penelitian yang mendukung hasil ini adalah Junaidi & Patra (2018), Subandoro & Amir (2017) dan Hanafi (2018) yang menunjukkan korupsi berpengaruh negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini juga didukung teori agensi, bahwa dalam hubungan *agent* dan *principal* terdapat konflik kepentingan dan asimetri informasi. Teori agensi dalam permasalahan korupsi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan keagenan yang bersifat oportunistik.

Agent melakukan *moral hazard* setelah terikat kontrak dengan *principal* dalam rangka mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

IPM seluruh provinsi Indonesia mengalami *trend* kenaikan pada tingkatan yang berbeda-beda. Tingkat korupsi sejumlah provinsi mayoritas mengalami *trend* kenaikan yaitu di 26 provinsi, hanya 8 provinsi yang mengalami *trend* penurunan tingkat korupsi. Indikator pengukur kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini terdiri dari RDF, REPAD, RPAB dan RKB langsung. RDF mengalami *trend* penurunan di 23 provinsi, rasio efektivitas PAD mengalami *trend* penurunan di 28 provinsi, rasio penyerapan anggaran belanja mengalami *trend* penurunan di 31 provinsi dan rasio keserasian belanja langsung mengalami *trend* kenaikan di 21 provinsi. PDRB per kapita mengalami *trend* kenaikan hampir diseluruh provinsi.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh simpulan kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kinerja keuangan daerah akan semakin meningkatkan IPM sebagai alternatif dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Sehingga *trend* penurunan rasio kinerja keuangan daerah merupakan tantangan bagi banyak pemerintahan daerah untuk berupaya lebih optimal lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Di sisi lain, tingkat korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkat korupsi akan semakin menurunkan indeks pembangunan manusia (IPM). *Trend* meningkatnya tingkat korupsi di hampir seluruh provinsi di Indonesia merupakan tantangan juga bagi pemerintahan daerah karena hal ini dapat mengganggu tujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut 1) Rasio kinerja keuangan daerah yang digunakan hanya terdiri dari RDF, REPAD RPAB dan RKB langsung; 2) Tingkat korupsi diukur hanya dari jumlah kasus

korupsi, sedangkan kerugian negara yang benar-benar terjadi tidak ditentukan semata-mata oleh banyaknya kasus korupsi yang terjadi di suatu daerah. Ada kemungkinan kasus korupsi di suatu daerah sedikit tetapi kerugian negara lebih banyak daripada jumlah kasus korupsi yang banyak di daerah lain. Berdasar simpulan dan keterbatasan, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah 1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan beberapa rasio lainnya. Selain itu peneliti juga dapat melakukan pengukuran tingkat korupsi berdasarkan nilai kerugian negara. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan model penelitian dengan menambahkan beberapa variabel lainnya; 2) Bagi pemerintah daerah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: a) pemerintah daerah diharapkan lebih baik dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga bisa mencapai kinerja keuangan daerah yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya meningkatkan rasio derajat desentralisasi fiskal, meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah, meningkatkan penyerapan anggaran belanja dan memberi porsi yang lebih besar pada anggaran belanja langsung; b) pemerintah daerah yang memiliki *trend* rasio kinerja keuangan daerah yang menurun sebaiknya melakukan evaluasi dalam tahap penganggaran dan pelaksanaan APBD sehingga dapat memaksimalkan kinerja keuangan daerahnya; c) pemerintah daerah dengan *trend* tingkat korupsi meningkat, sebaiknya dapat melakukan berbagai tindakan pencegahan yang dapat menurunkan jumlah kasus korupsi di daerah; d) pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang berorientasi kepada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. 2018. Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9 (3), 471 - 486.
- Akcey, S. 2006. Corruption and Human Development. *Cato Journal* Vol.26 (1), 29 - 48.

- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Kecerassian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 3 (6), 257-264.
- Amundsen, I. 1999. *Political Corruption: An Introduction to the Issues*. Norway: Chr. Michelsen Institute.
- Anggraini, T., & Sutaryo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Azwar, & Subekan, A. 2014. Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Vol.I/XII/2014*, 79 - 101.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R., & Siregar, B. 2015. The Evaluation of The Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets* 7(1), 1-11.
- Balago, G. S. 2014. A Conceptual Review of Agency Models of Performance Evaluation. *International Journal of Finance and Accounting* 3(4), 244 - 252.
- BPS. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)*. Badan Pusat Statistik.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Tiongson, E. 2000. *Corruption and The Provision of Health Care and Education Service*. Washington: International Monetary Fund.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi . *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 (1)*, 53 - 64.
- Hall, D. 2012. *Corruption and Public Services*. PSIRU University of Greenwich.
- Hamid, A. A. 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka - Jawa Barat. *Jurnal SEKURITAS*, 38 - 51.
- Hanafi, S. 2018. Pengaruh Korupsi Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia. *Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman* 4 (1), 109 -126.
- Harliyani, E. M., & Haryadi. 2016. Pnegaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 3 (3), 129 - 140.
- Heriningsih, S., & Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi* 11 (1), 1-86.
- Huntington, S. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Connecticut: Yale University Press.
- ICW. 2018. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
- Indramawan, D. 2018. The Impact of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (pp. 1247 - 1272).

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305 - 360.
- Junaidi, & Patra, I. K. 2018. Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3 (1), 71 - 79.
- Kejaksanaan Agung RI. 2018. *Laporan Tahunan Kejaksanaan Agung RI*. Jakarta: Kejaksanaan Agung RI.
- KPK. 2019. *TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Retrieved from www.kpk.go.id: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Lessmann, C., & Markwardt, G. 2009. One Size Fits All? Decentralization, Corruption, and the Monitoring of Bureaucrats. *CESifo Working Paper No. 2662*, 1 - 29.
- Liu, J., & Lin, B. 2012. Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research* 5, 163 - 186.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Cetakan Keempat*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mauro, P. 1998. Corruption and The Composition of Government Expenditure. *Journal of Public Economics* 69 (2), 263 - 279.
- Putry, N. A., & Badrudin, R. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JRMB* 12 (1), 25 - 34.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. 2017. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.10 (1)*, 134 - 147.
- Rochjadi, A. 2006. *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Santoso, I. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom, Cetakan I*. Yogyakarta: Gava Media.
- Scott, W. R. 2000. *Financial Accounting Theory, Second Edition*. Canada: Prentice Hall.
- Sinaga, E. J. 2016. Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding Vol.5 (2)*, 261 - 274.
- Subandoro, Y. K., & Amir, H. 2017. Pengaruh Korupsi Terhadap Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia. *Kajian Ekonomi & Keuangan* 1 (3), 259 - 272.
- Suyaningsih, N. N., Utama, M. S., & Yasa, I. M. 2015. Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 537 - 554.
- Todaro, M. P., & Stephen, C. S. 2006. *Economic Development, 9th Edition*. New York: Pearson Addison Wesley.
- Yunita, N., & Putra, I. S. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Porbudpar Kota Blitar. *Jurnal Peta Vol.3 (1)*, 95 - 108.